



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT

TAHUN  
**2022**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 101 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 87**  
**TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone, diubah sebagaimana tercatum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 3 November 2021

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 3 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 102**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR 101 TAHUN 2021  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE**



| No.  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab   |
|--|---|----------------------------------|---|---|--|
| 1  | 3   | 5                                | 6   | 7   | 8  |
| <b>Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</b> |   |                                  |   |   |  |
| 1.   | Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Indeks Reformasi Birokrasi       | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Bagian Organisasi Setda  |
|  | Berkurangnya Kasus KKN  | Proporsi OPD yang Bebas dari KKN | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Bebas dari KKN}}{\text{Jumlah Total OPD}} \times 100\%$  | Inspektorat Daerah  | Inspektorat Daerah   |
| <b>Misi 2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat</b>                              |   |                                  |   |   |  |
| 2.   | Menurunkan Angka Kemiskinan   | Persentase Penduduk Miskin       | $p_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana:<br/> <math>\alpha = 0</math><br/> <math>Z =</math> Garis Kemiskinan<br/> <math>Y_i =</math> Rata-Rata Pengeluaran per kapita Sebulan Penduduk yang Berada di bawah Garis Kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots,q</math>), <math>y_i &lt; Z</math><br/> <math>Q =</math> Banyaknya Penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan<br/> <math>n =</math> Jumlah Penduduk</p> | BPS   | (Koordinator):<br>Bappeda (Bidang PPM)<br>(Pendukung):<br>DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja            | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data | Penanggung Jawab   |
|-----|---|------------------------------|--|-------------|--|
| 1   | 3   | 5                            | 6  | 7           | 8  |
|     | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi                      | Pertumbuhan Ekonomi          | $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:<br/> t+1 = Tahun Pengamatan PDRB<br/> t = Tahun Pengamatan PDRB Sebelumnya</p>   | BPS         | (Koordinator):<br>Bappeda (Bidang Ekonomi)<br>(Pendukung):<br>DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan               |
|     | Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Per Kapita        | $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$  | BPS         | (Koordinator):<br>Bappeda (Bidang Ekonomi)<br>(Pendukung):<br>DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial |
|     | Tersedianya Lapangan Pekerjaan                        | Tingkat Pengangguran Terbuka | $\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$  | BPS         | (Koordinator):<br>Dinas Ketenagakerjaan  |
|     | Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan          | Indeks Gini                  | $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>P<sub>i</sub> = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i<br/> Q<sub>i</sub> = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i<br/> Nilai <i>gini ratio</i> Berkisar antara 0 dan 1, jika:<br/> G &lt; 0,3 = Ketimpangan Rendah<br/> 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang<br/> G &gt; 0,5 = Ketimpangan Tinggi</p> | BPS         | (Koordinator):<br>Bappeda (Bidang Perekonomian dan SDA)<br>(Pendukung):<br>Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan  |

| No.  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data                            | Penanggung Jawab   |
|--|---|--|---|--|--|
| 1  | 3   | 5  | 6   | 7                                      | 8  |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya</b> |   |  |   |  |  |
| 3.   | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif                         | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)           | $IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$<br>Dimana:<br>$X_{(1)}$ : Indeks Harapan Hidup<br>$X_{(2)}$ : Indeks Pendidikan = $2/3(\text{Indeks Melek Huruf}) + 1/3(\text{Indeks Rata-Rata Lama Sekolah})$<br>$X_{(3)}$ : Indeks Standar Hidup Layak<br><br>$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\maks} - X_{(i)\min}}$<br>Dimana:<br>$X_{(1)}$ : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3)<br>$X_{(2)}$ : Nilai Maksimum Sekolah $X_{(i)}$<br>$X_{(3)}$ : Nilai Minimum Sekolah $X_{(i)}$ | BPS                                    | Bappeda (Bidang PPM)   |
|  | Membaiknya Layanan Pendidikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat                 | Indeks Pendidikan                          | $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}}}{2}$   | Dinas Pendidikan                       | Dinas Pendidikan   |
|  | Membaiknya Layanan Kesehatan kepada seluruh Lapisan Masyarakat                  | Indeks Kesehatan                           | $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\maks} - AHH_{\min}}$  | Dinas Kesehatan                        | Dinas Kesehatan  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak            | Indeks Pemberdayaan Gender                 | $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$   | DP3A                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |
| <b>Misi 4 : Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan</b>                       |   |  |   |  |  |
| 4.   | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | Indeks Desa Membangun                      | $IDM = 1/3(IKS + IKE + IKL)$<br>Keterangan:<br>$IKS$ : Indeks Ketahanan Sosial<br>$IKE$ : Indeks Ketahanan Ekonomi<br>$IKL$ : Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | (Koordinator):<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pendukung):<br>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Penataan Ruang; Dinas PSDA; Dinas Lingkungan Hidup. |
|  | Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman                         | Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri | $\frac{\text{Jumlah Desa Maju Mandiri Tahun } n}{\text{Jumlah Desa Berkembang Tahun } n-1} \times 100\%$  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | (Koordinator):<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pendukung):<br>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Penataan Ruang; Dinas PSDA; Dinas Lingkungan Hidup. |



| No.   | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab   |
|---|---|--|--|--|--|
| 1   | 3   | 5  | 6  | 7  | 8  |
| <b>Misi 5 : Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik</b> |   |  |  |  |  |
| 5.  | <i>Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik</i>                        | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB   | Jumlah Penanaman Modal Tahun n<br>-----<br>PDRB Tahun n x 100%   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                       |
|   | Meningkatnya Daya Tarik Investasi   | Nilai PMDN/PMA                             | Jumlah Penanaman Modal   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                       |
|   | Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik  | Indeks Inovasi Daerah                      | Penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri   | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah               | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                                     |
| <b>Misi 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat</b>  |   |  |  |  |  |
| 6.  | <i>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum</i> | Angka Kriminalitas                         | Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Dalam Satu Tahun   | Satuan Polisi Pamong Praja                             | Satuan Polisi Pamong Praja   |
|   | Membaiknya Penegakan Hukum  | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas    | Jumlah Laporan Pengaduan Tahun (n) – Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Tahun (n-1)<br>-----<br>x 100%<br>Jumlah Laporan Kriminalitas Tahun (n-1) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
|   | <i>Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat</i>                                   | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Tahun n<br>-----<br>Total APBD Tahun n x 100%  | Dinas Pariwisata                                       | (Koordinator):<br>BKAD<br>(Pendukung):<br>Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan |
|   | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata  | Jumlah Wisatawan                           | Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara  | Dinas Pariwisata                                       | Dinas Pariwisata   |


  
**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR 101 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 87 TAHUN 2018  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

| NO                        | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab  |
|---------------------------|---|--|--|---|-------------------|
| <b>Sekretariat Daerah</b> |   |  |  |   |                   |
| 1.                        | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Profesional | Kategori Nasional hasil Penilaian LPPD Kabupaten | Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negri                              | Dok. Bagian Tata Pemerintahan   | Sekretaris Daerah |
| 2.                        | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Daerah                                 | Tingkat Inflasi Daerah                           | Hasil Survey BPS Kab. Bone   | Dok. BPS, Bagian SDA dan Bagian Perekonomian Kab. Bone  | Sekretaris Daerah |
| 3.                        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah                   | Nilai SAKIP oleh APIP                            | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Dok. Hasil Evaluasi/Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kab. Bone                                  | Sekretaris Daerah |
|                           |   | Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten                   | Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP oleh KemenpanRB/Tim                             | Dok. Hasil Evaluasi/Penilaian SAKIP oleh KemenpanRB   | Sekretaris Daerah |
|                           |   | Survey Kepuasan Masyarakat/IKM                   | Nilai Rata-Rata Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Khusus Unit Pelayanan Publik | Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi | Sekretaris Daerah |

| NO                        | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|---------------------------|--|--|---|---|------------------|
| <b>Sekretariat DPRD</b>   |  |  |   |   |                  |
| 1.                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD                       | Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   | (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD   | Anggota DPRD pada Bagian Umum Set DPRD  | Sekretaris DPRD  |
| 2.                        | Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang di Akomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD        | Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD | $\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang Ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aspirasi}} \times 100\%$                                 | Aspirasi Masyarakat pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan                                    | Sekretaris DPRD  |
|                           |  | Persentase memfasilitasi Ranperda  | $\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rancangan Perda}} \times 100\%$   | Usulan Pemerintah Daerah/Eksekutif dan Inisiatif DPRD pada Bagian Persidangan dan Risalah                 | Sekretaris DPRD  |
| 3.                        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan                              | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Angka Nilai dari Inspektorat  | SAKIP oleh APIP   | Sekretaris DPRD  |
| <b>Inspektorat Daerah</b> |  |  |   |   |                  |
| 1.                        | <i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel</i> | Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP                 | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB               | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab Bone oleh Kementerian PAN-RB, pada Tahun 2018-2023 | Inspektur Daerah |
|                           |  | Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)                        | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023                            | Inspektur Daerah |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|---|------------------|
|    |  | Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                     | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP  | Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemkab Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023  | Inspektur Daerah |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan | Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara Jumlah OPD yang Predikat Implementasi SAKIPnya minimal B (>60) dengan Jumlah Total OPD Pemkab Bone, berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone)  | Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP seluruh OPD Lingkup Pemkab Bone setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023  | Inspektur Daerah |
|    |  | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI             | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Temuan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh OPD dengan jumlah Total Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Keuangan & Kinerja Pemkab Bone hingga tahun berkenaan/tahun pelaporan | Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pemerintah Kab. Bone yang dirilis setiap tahunnya oleh BPK-RI, pada Tahun 2018-2023                                 | Inspektur Daerah |
|    |  | Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP    | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara Jumlah OPD yang Menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan jumlah Total OPD Pemkab Bone yang wajib dinilai/dievaluasi, berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone)                        | Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) OPD Lingkup Pemkab Bone yang wajib dinilai setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023 | Inspektur Daerah |

| NO                      | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab        |
|-------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
|                         |   | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima setiap tahunnya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone | Data Laporan Tahunan atas Realisasi Penanganan/ Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone atas penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023 | Inspektur Daerah        |
| 3.                      | Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)  | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian (Assessment) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP  | Laporan Hasil Penilaian (Assessment) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023  | Inspektur Daerah        |
| <b>Dinas Pendidikan</b> |   |  |  |  |                         |
| 1.                      | Meningkatnya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat                                 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah   | $\frac{\text{Lama Sekolah Penduduk } i \text{ yang Berusia } 15 - 24 \text{ Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } 15-24 \text{ Tahun}}$   | Dinas Pendidikan   | Kepala Dinas Pendidikan |
|                         |   | Harapan Lama Sekolah   | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia } i \text{ yang Bersekolah pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk Usia } i \text{ pada tahun } t}$  | Dinas Pendidikan   | Kepala Dinas Pendidikan |
| 2.                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendidikan  | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP  | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Kab. Bone  | Kepala Dinas Pendidikan |

| NO                     | Tujuan/Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja                | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab       |
|------------------------|--|----------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Dinas Kesehatan</b> |  |                                  |  |  |                        |
| 1.                     | Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Persentase Balita Stunting       | $\frac{\text{Jumlah Balita Pendek} + \text{Balita Sangat Pendek}}{\text{Jumlah Balita yang di Ukur Panjang/Tinggi Badan}} \times 100\%$  | Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan       | Kepala Dinas Kesehatan |
|                        |  | Angka Kematian Bayi              | $\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun) pada Satu Tahun Tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu}} \times 100\%$  | Format Laporan Kematian Bayi dan Balita pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan  | Kepala Dinas Kesehatan |
|                        |  | Angka Kematian Ibu               | $\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas di suatu Wilayah Tertentu selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah tersebut dan pada Kurun Waktu yang Sama}} \times 100\%$ | Format Laporan Kematian Ibu pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan              | Kepala Dinas Kesehatan |
|                        |  | Persentase Balita Gizi Buruk     | $\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita yang di Ukur Berat Badan}} \times 100\%$   | Hasil Pemantauan Satus Gizi (PSG) pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan        | Kepala Dinas Kesehatan |
|                        |  | Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat | $\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$   | Laporan Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                      | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab       |
|----|--------------------------|--|---|---|------------------------|
|    |                          | Indeks Keluarga Sehat                                  | $\frac{\text{Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang Bernilai 1}}{12 - \text{Jumlah Indikator yang tidak ada di Keluarga}} \times 100\%$   | Aplikasi Keluarga Sehat pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                          | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | $\frac{\text{Jumlah Penderita DBD yang Ditangani sesuai SOP di Satu Wilayah Kerja Selama Satu Tahun}}{\text{Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan di Satu Wilayah Dalam Kurun Waktu yang Sama}} \times 100\%$ | Rekap Laporan Bulanan P2 pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit               | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                          | Angka Kejadian Malaria                                 | $\frac{\text{Penduduk yang Menderita Malaria pada Tahun tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk pada Pertengahan Tahun}} \times 100\%$   | SISMAL (Sistem Malaria Terpadu) pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit        | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                          | Prevalensi HIV/AIDS                                    | $\frac{\text{Jumlah Pasien HIV dan AIDS di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu yang Sama}} \times 100\%$                          | Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA) pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit       | Kepala Dinas Kesehatan |
|    |                          | Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi           | $\frac{\text{Jumlah Fasilitas yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan}} \times 100\%$   | Hasil Akreditasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan       | Kepala Dinas Kesehatan |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                    |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang</b> |   |   |  |  |   |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP   | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 2.  | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang                             | Tingkat Kemantapan Jalan  | $\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$  | Bidang Bina Marga  | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone | $\frac{\text{Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Rumah Tangga Mendapat Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam Sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga di Kabupaten Bone}} \times 100\%$ | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan                             | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | $\frac{\text{Jumlah Rumah yang memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk} + \text{Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya Diolah di IPALD}}{\text{Jumlah Rumah di Kabupaten Bone}} \times 100\%$  | Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan                             | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
|   |   | Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik   | $\frac{\text{Jumlah Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Pemerintah}} \times 100\%$  | Bidang Bangunan Gedung   | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |



| NO   | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                    |
|--|---|--|--|--|---|
|  |   | Persentase Kesesuaian Tata Ruang   | $\frac{\text{Realisasi RTR}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$  | Bidang Tata Ruang  | Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| <b>Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi</b> |   |  |  |  |   |
| 1.   | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                 | $\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}} \times 100\%$                                     | Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air   | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi    |
|  |   | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | $\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota (m)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (m)}} \times 100\%$         | Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air   | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi    |
|  |   | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi  | $\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh jaringan Irigasi yang Dibangun (ha), Ditingkatkan (ha), Direhabilitasi (ha), Dioperasikan dan Dipelihara (ha) di Tahun Eksisting}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100\%$ | Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi    |
| 2.   | Tersedianya Tenaga Jasa Konstruksi                              | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Persen)  | $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli di Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$  | Bidang Bina Jasa Konstruksi  | Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi    |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab    |
|---|---|--|---|---|---------------------|
| <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b> |   |  |   |   |                     |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah       | Nilai SAKIP OPD  | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone  | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone  | Kepala Disperkimtan |
| 2.  | Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)  | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$ | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kepala Disperkimtan |
|   |   | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni (SPM) |   |   |                     |
| 3.  | Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh  | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota yang Ditangani   | $\frac{\text{Jumlah Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100\%$  | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kepala Disperkimtan |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab    |
|----|---|--|--|---|---------------------|
| 4. | Meningkatnya Rumah Layak Huni   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                           | $\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$                 | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kepala Disperkimtan |
| 5. | Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air bersih, jalan lingkungan dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman | Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | $\frac{\text{Jumlah Unit Rumah yang Sedang Dibangun Terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kepala Disperkimtan |
| 6. | Meningkatnya Lahan Pemerintah yang Bersertifikat  | Persentase Bidang Lahan Pemerintah Yang Mendapatkan Sertifikat                   | $\frac{\text{Jumlah Bidang Lahan yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Total Bidang Lahan Kabupaten}} \times 100\%$                | Bidang Aset Pemda, Bidang Pertanahan DPKPP Kab. Bone  | Kepala Disperkimtan |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b> |   |  |   |  |   |
| 1.  | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran          | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran    | <p>(Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Terdampak Kebakaran di Kab/Kota dalam tingkat Waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>+<br/>           Jumlah Layanan Pemadaman di Kab/Kota dalam tingkat Waktu Tanggap oleh Relawan Kebakaran yang Dibentuk dan atau di bawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Kejadian Kebakaran di Kab/Kota</p> | Laporan Kejadian Kebakaran   | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 2.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan       | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                                  | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone  | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>               |   |  |   |  |   |
| 1.  | Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)            | Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan                        | <p>Jumlah Laporan yang Ditangani dan Diselesaikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Laporan Pelanggaran K3</p>  | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja               |
| 2.  | Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda  | Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan | <p>Jumlah Kasus Pelanggaran yang Ditangani dan Diselesaikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Kasus Pelanggaran Perda</p>   | Bidang Penegakan Peraturan Daerah  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja               |
| 3.  | Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                   | Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Seluruh Wilayah Kecamatan   | Bidang Perlindungan Masyarakat   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja               |

| NO                           | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab                  |
|------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| 4.                           | Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat                                  | Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat                           | Jumlah Kasus   | Bidang Bimbingan Masyarakat   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5.                           | Menurunnya Kasus Kriminaitas  | Angka Kriminalitas   | Jumlah Angka Kriminal  | Polres Bone, Seksi Data dan informasi Bidang Linmas Satpol PP   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
|                              |   | Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani                            | $\frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani}} \times 100\%$  |   |                                   |
| <b>Dinas Sosial</b>          |   |  |  |   |                                   |
| 1.                           | Meningkatnya Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial              | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Dinas Sosial  | Kepala Dinas Sosial               |
| 2.                           | Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani | $\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani}}{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Seharusnya Ditangani}} \times 100\%$ | Dinas Sosial  | Kepala Dinas Sosial               |
| <b>Dinas Ketenagakerjaan</b> |   |  |  |   |                                   |
| 1.                           | Meningkatnya Daya Saing dan Penyerapan Tenaga Kerja yang Berkompeten  | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka                                  | $\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$   | Laporan Tahunan   | Kepala Dinas Ketenagakerjaan      |
|                              |   | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja yang Terlatih                         | $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Terserap Terlatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan}} \times 100\%$   | Laporan Tahunan pada UPTD BLK, dan Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja   | Kepala Dinas Ketenagakerjaan      |
|                              |   | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan                          | $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$   | Laporan Tahunan pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas | Kepala Dinas Ketenagakerjaan      |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab             |
|---|--|--|--|--|------------------------------|
| 2.  | Meningkatnya Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja                           | Presentase Peserta Jamsostek Aktif                             | $\frac{\text{Jumlah Peserta Jamsostek Aktif}}{\text{Jumlah Buruh/Pekerja}} \times 100\%$   | Laporan Tahunan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial               | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
|   |  | Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | $\frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani}} \times 100\%$  | Laporan Tahunan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial               | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| 3.  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan   | Predikat Nilai SAKIP Oleh APIP                                 | NILAI SAKIP Oleh APIP  | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Ketenagakerjaan |
| <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |  |  |  |  |                              |
| 1.  | Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Pemberdayaan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender IPG                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan Gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan Pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila IPM sama dengan nilai IPG</li> <li>IPG Merupakan Indikator Komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM antara dimensi harapan hidup saat lahir tingkat pendidikan dan tingkat kelayakan hidup IPG memperhitungkan berdasarkan capaian Gender, secara sederhana IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambar kepentingan Gender</li> </ul> | BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah                          | Kepala DPPPA                 |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------|--|---|---|------------------|
|    |                          |  | IPG : $\frac{1}{3} (\text{Xede (1)} + \text{Xede (2)} + \text{Line-Dist})$<br>Xede (1) = Xede untuk harapan hidup<br>Xede (2) = Xede untuk pendidikan<br>Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan   |   |                  |
|    |                          | Indeks Pemberdayaan Gender IDG             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IDG</b> merupakan indikator komposit untuk melihat peran yang aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. IDG dipokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</li> </ul> IDG :<br>$\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{line-Dist})$<br>Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen<br>IDM = Indeks Pengambilan Keputusan<br>Linc-dist = indeks distribusi pendapatan  | BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | Kepala DPPPA     |
|    |                          | Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud Organisasi Perempuan dan Anak adalah Organisasi Perempuan dan Anak yang memiliki AD/ART dan/atau berbadan hukum, terdaftar di kesbangpol atau dikementrian Hukum dan HAM.</li> <li>• Lembaga Organisasi Perempuan Pemerintah yang Aktif :<br/>           Lembaga Organisasi Perempuan Pemerintah yang tetap eksis atau masih aktif stahun dibagi jumlah lembaga/organisasi Kab/Kota.</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif}}{\text{Total Organisasi Perempuan}} \times 100\%$ | BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | Kepala DPPPA     |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab    |
|----|---|--|--|--|---------------------|
|    |   | <p>Persentase SKPD yang Menerapkan Anggaran Berbasis Gender (ARG)</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan penerapan anggaran berbasis gender adalah pernyataan anggaran gender bagi OPD Kabupaten/Kota dalam penyusunan anggaran telah menggunakan Gender Budget Statement (GBS) Analisa Gender</li> <li>• Untuk menemukan Isu/Kesenjangan Gender, bisa menggunakan alat analisis Gender yang ada. Salah satunya Gender Analysis Pathway (GAP).</li> <li>• Isu/Kesenjangan Gender dapat dilihat Output yang ada menyusun GBS. informasi yang didapat analisis dimasukkan ke dalam Dokumen (GBS)<br/>Rumusnya:<br/>Jumlah OPD yang telah menerapkan GBS dalam penyusunan anggaran dibagi total OPD Kab. Kota</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah OPD Menerapkan PPRG}}{\text{Total OPD Kab. Kota Bone}} \times 100\%$ | <p>OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah</p>  | <p>Kepala DPPPA</p> |
| 2. | <p>Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindakan Kekerasan</p> | <p>Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk (Usia 18 Tahun Ke atas)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kekerasan</b> adalah setiap perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, seksual, Psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (sesuai pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak)</li> </ul>   | <p>BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT- P2TP2A Kab. Bone</p> | <p>Kepala DPPPA</p> |



| NO | Tujuan/Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|---|------------------|
|    |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perempuan Korban kekerasan</b> adalah perempuan yang mengalami kekerasan Fisik, Sikis, Ekonomi, Seksual yang melapor pada Lembaga Layanan di daerah Kab/Kota</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Korban Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun ke atas Kab/Kota}} \times 100.000$ <p>Keterangan:<br/>           Jumlah Korban Perempuan Korban Kekerasan Tahun Ke .... (Orang)<br/>           Jumlah Perempuan Usia 18 Tahun ke atas Kabupaten Kota Tahun ke....</p> |   |                  |
| 3. | Meningkatnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera | Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Keluarga               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan kesetaraan Gender adalah suatu kesatuan Gender untuk kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan terpenuhinya hak anak</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah penyedia layanan yang aktif}}{\text{Jumlah Kesetaraan Gender}} \times 100.000$   | BPS,OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT- P2TP2A Kab. Bone  | Kepala DPPP      |
| 4. | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  | Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus per 100.000. (Usia Kandungan -18 Tahun) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (sesuai dengan pasal 1 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</li> </ul>  | BPS, OPD terkait, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Laporan Data UPT- P2TP2A Kab. Bone | Kepala DPPP      |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis               | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|--|------------------|
|    |  |  | <p>Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hanya dibatasi pada data</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak yang berhadapan hukum</li> <li>2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika</li> <li>3. Anak dengan HIV/AIDS</li> <li>4. Anak Korban kekerasan fisik, dan sikis/emosional, kekerasan seksual, Penelantaran</li> <li>5. Anak Penyandang disabilitas</li> </ol> <p>Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <hr style="width: 100%; border: 0.5px dashed black;"/> <p>Jumlah Penduduk Anak Usia 0 -18 Tahun Kab. Kota</p>   |  |                  |
| 5. | Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah | Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah OPD Kabupaten Kota memiliki data terpilah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data adalah kumpulan nilai variable yang dinyatakan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif. Ringkasan data kuantitatif dinamakan statistik</li> <li>• Data terpilah adalah nilai variable-variabel yang terpilih menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik pada umumnya pemilihan ini dilakukan apabila kita akan melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan di suatu bidang tertentu</li> <li>• Data dapat dipilah menurut berbagai ciri atau karakteristik tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan. Bila melakukan analisa gender, data perlu dipilah menurut jenis kelamin. Untuk melakukan analisis kesenjangan alokasi pembangunan atau analisis special, data perlu dipilih menurut wilayah. Begitu analisa dapat dilakukan berdasarkan umur, waktu kejadian seperti analisis kohor dan analisis deret waktu atau analisis time series</li> </ul> | OPD terkait, Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah | Kepala DPPPA     |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|----|---|--|---|---|------------------|
|    |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, kondisi antara laki-laki dan perempuan.</li> </ul> <p style="text-align: center;">           Jumlah OPD yang memiliki data terpilah<br/>           ----- x 100%<br/>           Jumlah OPD Kabupaten Kota         </p>  |   |                  |
| 6. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak | Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) adalah : sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dan kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.</li> <li>Tujuan Kota Layak Anak (KLA) adalah : Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (<i>Convension on the rights of Chaild</i>) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/Kota.</li> <li>Sebuah Kabupaten/Kota layak Anak (KLA). idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut dilaksanakan pengelompokan indikator ke dalam 6 (Enam) bagian, yang meliputi, kelembagaan, Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang &amp; Kegiatan Budaya, perlindungan Khusus.</li> </ul> | DPPPA, Lembaga Pemerintah dan Non Pemeruntah, dan OPD yang terkait dengan KLA | Kepala DPPPA     |

| NO                            | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab              |
|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|
|                               |  |  | <p>Jumlah Lembaga dan Perangkat Kerja Daerah (OPD) yang Memiliki Penerapan KLA Kabupaten Kota (Tahun....ke)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Lembaga dan Perangkat Kerja OPD Kabupaten/Kota (Tahun.....ke)</p> |  |                               |
| <b>Dinas Ketahanan Pangan</b> |  |  |   |  |                               |
| 1.                            | Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Daerah             | Ketersediaan Pangan Utama (Persen)                 | <p>Jumlah Ketersediaan Pangan</p> <p>----- x 1000</p> <p>Jumlah Kebutuhan Pangan</p>  | Bidang Ketersediaan  | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.                            | Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam                        | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing Kelompok Pangan  | Bidang Konsumsi  | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 3.                            | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                  | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> |  |  |   |  |                               |
| 1.                            | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                    | Nilai Indeks Kualitas Air                          | Formulasi Perhitungan Indeks Kualitas Air sesuai Ketentuan dari KLH   | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan                          | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
|                               |  | Nilai Indeks Kualitas Udara                        | $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.10)]$   | Bidang Pengendalian Pencemaran   | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
|                               |  | Penghargaan Adipura                                | Penghargaan Adipura   | Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3                                     | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |

| NO   | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                               |
|--|---|---|---|--|--|
| 2.   | Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan       | Persentase Perusahaan/Usaha yang Taat Izin Lingkungan                         | $\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab Usaha Yang Taat Izin PPLH}}{\text{Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang di Awasi}} \times 100\%$ | Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                  |
| <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> |   |   |   |  |  |
| 1.   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                                       | Hasil Evaluasi oleh Inspektorat   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat Kab. Bone | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.   | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil           | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | $\frac{\text{Jumlah KTP Ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$                                  | Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk            | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |   |   | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$  | Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk            | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |   |   | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$                                   | Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                 | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab  |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|
| <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>             |   |                                   |  |   |   |
| 1.  | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa                 | Nilai Rata-Rata IKS               | $\frac{\text{Jumlah IKS Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$  | Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone   |
| 2.  | Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa                | Nilai Rata-Rata IKE               | $\frac{\text{Jumlah IKE Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$  | Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone   |
| 3.  | Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa     | Nilai Rata-Rata IKL               | $\frac{\text{Jumlah IKL Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$  | Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone   |
| 4.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD                  | Predikat Nilai SAKIP oleh APIP    | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab Bone   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone   |
| <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> |   |                                   |  |   |   |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB | Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR) | $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$                                | Laporan Bulanan F1 Pengendalian Lapangan (Dalap) pada Bidang Pengendalian Penduduk                        | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO                       | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                    | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab  |
|--------------------------|--|--|--|---|---|
|                          |  | Cakupan PUS ingin berKB tidak terlayani (Unmet need) | $\frac{\text{Jumlah PUS yang tidak ber-KB (ingin anak tunda + Tidak ingin anak lagi)}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$          | Laporan Bulanan F1 Pengendalian Lapangan (Dalap) pada Bidang Pengendalian Penduduk                                      | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| <b>Dinas Perhubungan</b> |  |  |  |   |   |
| 1.                       | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP oleh APIP                                | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone   | Kepala Dinas Perhubungan                                  |
| 2.                       | Meningkatnya Ketersediaan Insfrastruktur Dasar   | Rasio Ijin Trayek                                    | $\frac{\text{Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$   | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan   | Kepala Dinas Perhubungan                                  |
| 3.                       | Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkualitas dan Didukung dengan Sumber Daya Manusia Transportasi yang Handal, Efisien dan Efektif | Persentase Pelayanan Angkutan Umum                   | $\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lalu Lintas dan Angkutan</li> <li>UPT Terminal dan Perparkiran</li> </ul> | Kepala Dinas Perhubungan                                  |
|                          |  | Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum             | $\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang tidak Memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah Angkutan Umum pada Tahun n}} \times 100\%$ | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor  | Kepala Dinas Perhubungan                                  |
|                          |  | Pemasangan Rambu-Rambu                               | $\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia}} \times 100\%$      | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan   | Kepala Dinas Perhubungan                                  |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab                                    |
|---|--|--|--|---|---|
| <b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b> |  |  |  |   |   |
| 1.  | Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian oleh Inspektorat Kab. Bone | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2.  | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik                  | Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   | $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$    | Laporan Triwulan pada Bidang Komunikasi, dan Bidang Informasi Publik  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 3.  | Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government                                   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo   | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ | Laporan Triwulan pada Bidang TI   | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 4.  | Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral                                      | Persentase Organisasi Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$  | Laporan Triwulan pada Bidang Statistik  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 5.  | Meningkatnya Keamanan Informasi  | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)   | $\frac{\text{Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100\%$                                | Laporan Triwulan pada Bidang Persandian   | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |



| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b> |  |   |  |  |   |
| 1.  | Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Koperasi Berprestasi                               | Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT Volume Usaha dan Aset | $\frac{\text{Jumlah Koperasi RAT}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif/Keseluruhan}} \times 100\%$       | Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi (RAT), Online Data Sistem Koperasi (ODS), Data Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Kab. Bone pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2.  | Meningkatkan Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah                                     | Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha                                    | $\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru}}{\text{Jumlah Wirausaha yang ada}} \times 100\%$ | Rekap Laporan Data UKM (ODS) pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro  | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Predikat Hasil Evaluasi SAKIP  | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Inspektorat Kab. Bone  | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab  |
|---|---|----------------------------|---|--|---|
| <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b> |   |                            |   |  |   |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP                             | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ditentukan dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan PTSP, dan Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan                  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.  | Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone | Nilai PMA/PMDN             | Nilai PMA/PMDN  | laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO                                   | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                      | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                     |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|
| <b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b> |  |  |   |  |                                      |
| 1.                                   | Meningkatnya Potensi Sumber Daya Kepemudaan dalam Mendukung Pembangunan Daerah     | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                | $\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$   | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan, dan Bidang Pengembangan Pemuda | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
|                                      |  | Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda                  | $\frac{(\text{Jumlah Wirausaha Muda Tahun ini} - \text{Jumlah Wirausaha Muda Tahun lalu})}{\text{Jumlah Wirausaha Muda Tahun lalu}} \times 100\%$ | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pengembangan Pemuda   | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.                                   | Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui Pembinaan yang Kompetitif dan Berkelanjutan | Cakupan Pembinaan Olahraga                             | $\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada/Terdaftar}} \times 100\%$                         | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga      | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
|                                      |  | Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional dalam Satu Tahun  | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga      |                                      |

| NO                      | Tujuan/Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab        |
|-------------------------|--|--|--|---|-------------------------|
|                         |  | Cakupan Pembinaan Atlit Muda                                   | $\frac{\text{Jumlah Pelajar yang Dibina}}{\text{Jumlah Seluruh Atlit Pelajar}} \times 100\%$                               | Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga |                         |
| <b>Dinas Kebudayaan</b> |  |  |  |   |                         |
| 1.                      | Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah | Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%) | $\frac{\text{Jumlah Karya Budaya yang diakui}}{\text{Jumlah Karya Budaya yang di Targetkan}} \times 100\%$                 | Rekap Data Karya budaya pada Bidang Promosi dan Dokumentasi, dan Bidang Adat dan Tradisi                      | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 2.                      | Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah                         | Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)         | $\frac{\text{Jumlah Warisan Adat Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Warisan Budaya}} \times 100\%$ | Rekap Data Warisan Budaya pada Bidang Adat dan Tradisi, dan Bidang Kesenian                                   | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 3.                      | Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah                         | Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)           | $\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang di Targetkan}} \times 100\%$    | Rekap Data Cagar Budaya pada Bidang Sejarah dan Purbakala   | Kepala Dinas Kebudayaan |
| 4.                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan          | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                              | Nilai Capaian Target Kinerja Ditentukan Berdasarkan Hasil Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone        | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP oleh APIP   | Kepala Dinas Kebudayaan |

| NO                                      | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab                        |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b> |  |   |  |   |   |
| 1.                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                                   | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2.                                      | Meningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan                               | Persentase Perpustakaan Daerah yang Memenuhi Standar Pelayanan      | $\frac{\text{Jumlah Perpustakaan yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah Perpustakaan}} \times 100\%$                                   | Data Laporan Bulanan Bidang Pengembangan Perpustakaan                     | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  | Persentase Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan                   | $\frac{\text{Jumlah Pengelola Perpustakaan}}{\text{Jumlah Perpustakaan}} \times 100\%$   | Data Laporan Bulanan Bidang Pengembangan Perpustakaan                     | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Nilai Capaian Kinerja Diperoleh dari Hasil Survey Penilaian Kepuasan Masyarakat  | Laporan Hasil Survey pada   | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  | Persentase Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Perbulan dalam 1 Tahun | $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Bulan dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan}} \times 100\%$ | Data Laporan Bulanan Bidang Layanan Perpustakaan                          | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |  | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun                            | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun   | Data Laporan Bulanan Bidang Layanan Perpustakaan                          | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3.                                      | Meningkatnya Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan                      | Persentase Koleksi Buku yang Tersedia Diperpustakaan Daerah         | $\frac{\text{Jumlah Koleksi Buku (examp.) Perpustakaan Daerah}}{\text{Jumlah Judul Buku}} \times 100\%$                              | Data Laporan Tahunan Bidang Pustaka                                       | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4.                                      | Meningkatnya Komunitas Baca  | Persentase Peningkatan Komunitas Baca                               | $\frac{\text{Jumlah Komunitas Baca yang Terbentuk}}{\text{Jumlah Komunitas Baca}} \times 100\%$                                      | Data Laporan Tahunan Bidang Pengembangan Perpustakaan                     | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| NO                     | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                        |
|------------------------|---|--|---|--|---|
| 5.                     | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah secara Baku                       | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$         | Data Laporan Tahunan Bidang Pembinaan Kearsipan  | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|                        |   | Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan               | $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | Data Laporan Bulanan Bidang Pembinaan Kearsipan  | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 6.                     | Meningkatnya Arsip SKPD yang Diakuisisi                                 | Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Telah Diakuisisi   | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah Diakuisisi Arsipnya}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$           | Data Laporan Tahunan Bidang Pengelolaan Kearsipan  | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| <b>Dinas Perikanan</b> |   |  |   |  |   |
| 1.                     | Meningkatnya Produksi Perikanan   | Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap                       | $\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$   | Renstra/Laporan Tahunan Bidang Kenelayanan   | Kepala Dinas Perikanan                  |
|                        |   | Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya                      | $\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$   | Renstra/Laporan Tahunan Bidang Pengembangan Budidaya Air Payau dan Bidang Pengembangan Budidaya Air Tawar  | Kepala Dinas Perikanan                  |
|                        |   | Pertumbuhan Produksi Perikanan Olahan Hasil Perikanan        | $\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$   | Renstra/Laporan Tahunan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Daya Saing   | Kepala Dinas Perikanan                  |
| 2.                     | Meningkatnya Akuntabilitas Urusan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan | Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)      | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$   | Renstra/Laporan Tahunan Sekretariat, Bidang Kenelayanan, Bidang Pengembangan Budidaya Air Payau, Bidang Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Daya Saing | Kepala Dinas Perikanan                  |

| NO   | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab        |
|--|--|---|--|---|-------------------------|
| <b>Dinas Pariwisata</b>                                  |  |   |  |   |                         |
| 1.   | Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)             | Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata                   | $\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah Target PAD Sektor Pariwisata}} \times 100\%$          | Daftar realisasi PAD sektor wisata  | Kepala Dinas Pariwisata |
| 2.   | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Destinasi Pariwisata          | Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan               | $\frac{\text{Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Daerah Tujuan Wisata}} \times 100\%$ | Daftar obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan                   | Kepala Dinas Pariwisata |
|  |  | Jumlah Rata-Rata Lama Tinggal   | $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Lama Tinggal Wisatawan}}{\text{Jumlah Wisatawan Keseluruhan}} \times 100\%$              | Daftar tamu hotel, wisma, dan home stay                                   | Kepala Dinas Pariwisata |
| 3.   | Meningkatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)                   | Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)                    | $\frac{\text{Jumlah Pokdarwis Keseluruhan}}{\text{Jumlah ODTW Keseluruhan}} \times 100\%$                                | SK Kadis tentang Pembentukan/ pengukuhan Pokdarwis                        | Kepala Dinas Pariwisata |
| 4.   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas pariwisata              | Predikat SAKIP Dinas Pariwisata hasil evaluasi oleh APIP                    | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | LHE Implementasi SAKIP oleh APIP Kabupaten (Inspektorat Daerah Kab. Bone) | Kepala Dinas Pariwisata |
| <b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</b> |  |   |  |   |                         |
| 1.   | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan | Kontribusi Produksi Pertanian Terhadap PDRB (%)                             | $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100\%$                      | Badan Pusat Statistik   | Kepala Dinas TPHP       |
|  |  | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (kw/ha) | $\frac{\text{Jumlah Produksi Padi (Ton)}}{\text{Luas Panen (Ha)}} \times 100\%$  | Dinas TPHP  | Kepala Dinas TPHP       |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                           | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                            |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  | Cakupan Bina Kelompok Tani (%)              | $\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani yang Dibina}}{\text{Jumlah Total Kelompok Tani}} \times 100\%$   | Dinas TPHP   | Kepala Dinas TPHP                           |
| <b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> |  |   |  |  |   |
| 1.  | Meningkatnya Produksi Pemasaran Hasil Peternakan dan Kualitas Ternak | Persentase Peningkatan Produksi Telur       | $\frac{(\text{Jumlah Produksi Telur Tahun ini} - \text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu})}{\text{Jumlah Produksi Telur Tahun Lalu}}$                   | Validasi Data dan Statistik DPKH pada Bidang Bina Produksi, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengembangan Agro Industri dan Agribisnis Peternakan, dan UPTD Kawasan Perbibitan dan Penyuluhan           | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|   |  | Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi | $\frac{(\text{Jumlah Produksi Daging Sapi Tahun ini} - \text{Jumlah Produksi Daging Sapi Tahun Lalu})}{\text{Jumlah Produksi Daging Sapi Tahun Lalu}}$ | Validasi Data dan Statistik DPKH pada Bidang Bina Produksi, Bidang Sarana dan Prasarana, dan Bidang Pengembangan Agro Industri dan Agribisnis Peternakan, UPTD Kawasan Perbibitan dan Penyuluhan, UPTD RPH | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |



| NO                       | Tujuan/Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                            |
|--------------------------|---|---|---|--|---|
| 2.                       | Meningkatnya Kesehatan dan Mutu Ternak                  | Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB                 | $\frac{\text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun ini} - \text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hasil IB Tahun Lalu}}$  | Validasi Data dan Statistik DPKH pada Bidang Bina Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, UPTD Pelaksana IB | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|                          |   | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | $\frac{\text{Jumlah Kejadian Penyakit Kasus Tahun Berjalan (t)} - \text{Jumlah Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$ | Validasi Data dan Statistik DPKH pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, UPTD Puskesmas                          | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| <b>Dinas Perdagangan</b> |   |   |   |  |   |
| 1.                       | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Perdagangan | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                           | $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100\%$   | BPS  | Kepala Dinas Perdagangan                    |
|                          |   | Persentase Pasar dalam Kondisi Baik                                   | $\frac{\text{Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pasar}} \times 100\%$   | Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi  |   |
|                          |   | Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang Terpublikasi      | $\frac{\text{Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang Terpublikasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan}} \times 100\%$  | Bidang Pengembangan Perdagangan  | Kepala Dinas Perdagangan                    |
|                          |   | Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal                         | $\frac{\text{Jumlah Kelompok Pedagang Usaha Informal yang dibina}}{\text{Jumlah Kelompok Pedagang Usaha Informal}} \times 100\%$  | Bidang Pengembangan Perdagangan  | Kepala Dinas Perdagangan                    |
| 2.                       | Peningkatan Perlindungan Konsumen                       | Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang                        | $\frac{\text{Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang}}{\text{Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang}} \times 100\%$  | Bidang Kemetrolgian  | Kepala Dinas Perdagangan                    |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data   | Penanggung Jawab           |
|---|--|--|---|---|----------------------------|
|   |  | Persentase Laporan Konsumen yang Ditindak Lanjuti  | $\frac{\text{Jumlah Laporan Konsumen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Konsumen}} \times 100\%$                           | Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting  | Kepala Dinas Perdagangan   |
| <b>Dinas Perindustrian</b>                  |  |  |   |   |                            |
| 1.  | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri   | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB   | $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$                                  | Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri serta BPS | Kepala Dinas Perindustrian |
|   |  | Persentase Pertumbuhan IKM   | $\frac{\text{Jumlah IKM yang Tahun (N+1) - (N-1)}}{\text{Jumlah Total IKM tahun N-1}} \times 100\%$                                 |   | Kepala Dinas Perindustrian |
|   |  | Nilai Produksi IKM   | Jumlah Nilai Produksi IKM   |   | Kepala Dinas Perindustrian |
| <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |  |  |   |   |                            |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah                 | Proporsi Usulan Kegiatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | $\frac{\text{Total Anggaran APBD}}{\text{Jumlah Total Anggaran Usulan Masyarakat}} \times 100\%$                                    | RKPD  | Kepala Bappeda             |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                       | Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai   | $\frac{\text{Jumlah Target Prioritas yang Tercapai}}{\text{Jumlah Target Prioritas}} \times 100\%$                                  | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Kepala Bappeda             |
| 3.  | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan | Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Pengambilan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan}}{\text{Jumlah Dokumen Sektor}} \times 100\%$ | Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                               | Kepala Bappeda             |

| NO                                    | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data   | Penanggung Jawab                      |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|
| <b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b> |   |   |  |   |                                       |
| 1.                                    | Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel secara Berkesinambungan  | Opini BPK-RI berdasarkan hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  | Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada tahun 2018-2023                   | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2.                                    | Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah   | Predikat Evaluasi SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Hasil Evaluasi oleh APIP         | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | LHE atas Implementasi SAKIP oleh APIP Kabupaten (Inspektorat Daerah Kab. Bone)                  | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 3.                                    | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel, berbasis teknologi dan informasi | Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD Tepat Waktu                                | Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu<br>Penjelasan :<br>a. Penyusunan dan Penetapan APBD paling Lambat 30 November tahun berkenaan<br>b. Perubahan APBD paling Lambat 30 September tahun berkenaan  | Perda tentang APBD dan Perubahan APBD oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah                   | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|                                       |   | Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu   | Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan<br><br>$\frac{\text{Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)}} \times 100$<br>Penjelasan :<br>a. Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD untuk di Audit BPK paling Lambat 3 Bulan setelah ahir tahun. | Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| NO                             | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                    | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                      |
|--------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
|                                |  |  | b. Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD), terdiri dari:<br>1) Laporan realisasi Anggaran (LRA);<br>2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL);<br>3) Neraca;<br>4) Laporan Arus Kas (LAK);<br>5) Laporan Operasional (LO);<br>6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);<br>7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK); dan<br>8) Penyusunan dan Penetapan LKPD paling Lambat tanggal 30 Juni tahun berkenaan. |  |                                       |
|                                |  | Asset manajemen                                      | a. Apakah ada daftar aset tetap (ya/tidak).<br>b. Apaka ada manual untuk Menyusun daftar Aset tetap ( Ya/tidak).<br>c. Apakah ada proses Inventarisasi asset tahunan (ya/ tidak).<br>d. Apakah Nilai asset tercantum dalam laporan Anggaran (Ya/ tidak).   | Laporan Hasil Evaluasi atas Indentifikasi dan Nilai dan Potensi asset daerah Oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| <b>Badan Pendapatan Daerah</b> |  |  |  |  |                                       |
| 1.                             | Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah                                       | Rasio PAD  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah   | Bapenda dan BKAD   | Kepala Bapenda                        |
| 2.                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP                       | Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang Dipublikasikan Oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone  | Inspektorat  | Kepala Bapenda                        |
| 3.                             | Meningktanya Pendapatan Asli Daerah  | Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah | $\frac{\text{Realisasi PAD N} - \text{Realisasi PAD (-N)}}{\text{Realisasi (-N)}} \times 100$ Ket : (N) Tahun ini<br>(-N) Tahun Lalu<br>Sumber Data : Realisasi Pendapatan   | Bapenda  | Kepala Bapenda                        |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|--|------------------|
| 4.  | Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan | Persentase Aplikasi Layanan Pendapatan Daerah                            | $\frac{\text{Persentase Realisasi Aplikasi Layanan Pendapatan}}{\text{Persentase Jumlah Aplikasi Layanan Pendapatan Daerah}} \times 100$                                 | Bapenda  | Kepala Bapenda   |
| <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |  |  |  |  |                  |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah         | Indeks Sistem Merit  | Hasil Penilaian Indeks Sistem Merit Oleh KASN RI Berdasarkan Permenpan RB No. 4 Tahun 2018 Dan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019)  | Hasil Rekapitulasi Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit, yang mencakup 8 area meliputi:<br>1) perencanaan kebutuhan;<br>2) pengadaan;<br>3) pengembangan karier;<br>4) promosi dan mutasi;<br>5) manajemen kerja;<br>6) penggajian, penghargaan, dan disiplin;<br>7) perlindungan dan pelayanan; dan<br>8) Sistem informasi | Kepala BKPSDM    |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi             | Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat diklat Manajerial | $\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural Yang Memiliki Sertifikat Diklat Kompetensi Teknis Manajerial (PKP, PKA dan PKN)}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural}} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data rekapitulasi peserta yang mengikuti diklat kompetensi Teknis Manajerial</li> <li>Data dari MY LIKE BONE</li> </ul>   | Kepala BKPSDM    |
|   |  | Persentase Pejabat Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi        | $\frac{\text{Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Diklat Kompetensi Teknis Fungsional}}{\text{Jumlah Aparatur Non Struktural}} \times 100\%$                         |  |                  |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                |
|---|--|--|---|--|---|
| 3.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan SDM     | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                                  | Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Oleh APIP   | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Kepala BKPSDM                                   |
| <b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b> |  |  |   |  |   |
| 1.  | Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah            | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan                        | $\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Sosial dan pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|   |  | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan    | $\frac{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan yang Dipedomani}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Kelitbangan}} \times 100\%$                | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2.  | Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Pemanfaatan dan Penerapan Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah       | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$                  | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Inovasi dan Teknologi   | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
|   |  | Persentase Kebijakan Inovasi dan Pemanfaatan Iptek yang Diterapkan | $\frac{\text{Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi yang Diusulkan}} \times 100\%$                   | Laporan triwulan dan Tahunan pada Bidang Inovasi dan Teknologi   | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>      |  |  |   |  |   |
| 1.  | Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana          | Persentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana              | $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$               | Data Pemantauan Daerah Rawan Bencana   | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah      |

| NO                      | Tujuan/Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja  | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data  | Penanggung Jawab                           |
|-------------------------|--|--|---|--|--|
|                         |  | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat}}{\text{Jumlah Seluruh Korban Bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat}} \times 100\%$        | Rekap Data Kejadian Bencana dan rekap Data BPBD  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                         |  | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP        | $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap darurat}}{\text{Jumlah Korban Bencana yang Seharusnya Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat}} \times 100\%$ | Rekap Data Kejadian Bencana dan rekap Data BPBD  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                         |  | Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana               | $\frac{\text{Jumlah Bencana yang Dilakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Masa Pasca Bencana}}{\text{Jumlah Bencana yang Harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi}} \times 100\%$   | Rekap Data Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan Akibat Bencana  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| <b>Badan Kesbangpol</b> |  |  |   |  |  |
| 1.                      | Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol | Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Aktif                                     | $\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan Tahun Tersebut}} \times 100\%$  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |
|                         |  | Persentase Orpol yang Berpartisipasi Aktif   | $\frac{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang Aktif Mendapat Pembinaan}}{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang terdaftar}} \times 100\%$   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri   | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |

| NO  | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                |
|---|---|---|--|--|---|
| 2.  | Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara          | Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif                                      | $\frac{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan}} \times 100\%$   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
|   |   | Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara | $\frac{\text{Jumlah Peserta yang telah Bersertifikat Pelatihan Bela Negara}}{\text{Jumlah Aparat \& Perwakilan LSM/Ormas}} \times 100\%$   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa                       | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
| 3.  | Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase Konflik sosial yang Tertangani   | $\frac{\text{Jumlah konflik Sosial yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Keseluruhan}} \times 100\%$   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik                                       | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
| 4.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik  | Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP   | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah   | Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Inspektorat Kab. Bone               | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
| <b>UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru</b> |   |   |  |  |   |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar layanan nasional  | Persentase Capaian Indikator Layanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar                | Untuk Mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit, diperlukan berbagai indikator. Indikator tersebut merupakan nilai parameter yang akan dipakai sebagai nilai banding antara fakta dengan standar yang diinginkan Indikator-Indikator tersebut Adalah: | Rekap Data Layanan Rumah Sakit   | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |



| NO | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja          | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab                                |
|----|--------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
|    |                          |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bed Occupancy Rate (BOR) = Rata-rata jumlah pasien keluar * Jumlah Kapasitas Tempat Tidur yang digunakan dalam satu tahun, BOR = 60-85%</li> <li>• Average Length Of Stay (ALOS) = Rata-rata Jumlah Pasien Keluar * Periode * Jumlah Hari Perawatan. Angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat, ALOS = 6-9 hari</li> <li>• Turn Over Internal (TOI) = (Jumlah kapasitas tempat tidur-rata jumlah pasien keluar )* periode/ Jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya TOI = 1-3 hari</li> <li>• Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 Jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, (Jumlah pasien mati &gt;48 Jam / Jumlah Pasien Keluar x 1000 permil</li> <li>• Gross Death Rate (GDR) = Jumlah pasien mati seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + Mati) x 1000 permil = ≤45%o</li> <li>• Bed Turn Over (BTO) = Jumlah hari perawatan/ Jumlah kapasitas tempat tidur. Angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan BTO = 40-50 kali</li> </ul> <p style="text-align: center;">           Jumlah Indikator Layanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar<br/>           ----- x 100%<br/>           Jumlah Seluruh Indikator Layanan Rumah Sakit         </p> |              |   |
|    |                          | Indeks kepuasan masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Nilai Rata-Rata IMK RS</b> </div>  | Hasil Survey | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |

| NO | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                               | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data                                | Penanggung Jawab                                |
|----|---|---|---|--|---|
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Rumah Sakit yang professional dan berintegritas | % pencapaian Indikator SPM yang memenuhi target | <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh peraturan Bupati Bone tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kab. Bone. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan Kesehatan berkualitas</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang Mencapai Target}}{\text{Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit}} \times 100\%$   | Laporan Pencapaian SPM                     | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |
|    |   | Pencapaian Standar Akreditasi Rumah Sakit       | <p>Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi KARS merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit versi KARS. Dikatakan memenuhi standar akreditasi rumah sakit versi KARS apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minima sebesar <math>\geq 80\%</math> dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan kesehatan rumah sakit tingkat nasional</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Hasil Penilaian Akreditasi Rumah Sakit</b></p> </div> | Hasil Survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru |

| NO   | Tujuan/Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja                        | Penjelasan/Formulasi Penghitungan   | Sumber Data                                      | Penanggung Jawab                                     |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   | Hasil Audit Akuntan Publik               | Indikator ini menunjukkan hasil audit eksternal (Auditor Independen) yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh rumah sakit<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Opini Hasil Audit</div> | Auditor Independen                               | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru      |
| <b>UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana</b> |   |  |   |  |  |
| 1.   | Peningkatan Kualitas Pelayanan RS sesuai Standar Nasional | BOR ( <i>Bed Occupancy Rate</i> ) 60-85% | Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit:<br>$\frac{\sum \text{Hari Perawatan}}{5 \text{ Hari dalam Satu Periode}} \times 100\%$<br>$\frac{\sum \text{Tempat Tidur}}{\dots} \times 100\%$  | Rencana Strategis RSUD Datu Pancaitana 2018-2023 | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
|  |   | LOS ( <i>Length of Stay</i> ) 6-9 Hari   | Tingkat Lamanya Perawatan Pasien:<br>$\frac{\sum \text{Lama Dirawat}}{\sum \text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$  | Rencana Strategis RSUD Datu Pancaitana 2018-2023 | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
|  |   | BTO (Bed Turn Over) 40-50 Kali           | Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur:<br>$\frac{\sum \text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\sum \text{Tempat Tidur}}$  | Rencana Strategis RSUD Datu Pancaitana 2018-2023 | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |
|  |   | TOI ( <i>Turn of Interval</i> ) 1-3 Hari | Tingkat Hari Dimana Tempat Tidur Tidak Ditempati dari saat ke saat sampai Terisi Berikutnya:<br>$\frac{((\sum \text{jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari Perawatan})}{\sum \text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 100\%$               | Rencana Strategis RSUD Datu Pancaitana 2018-2023 | Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana |

| NO               | Tujuan/Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja   | Penjelasan/Formulasi Penghitungan  | Sumber Data  | Penanggung Jawab |
|------------------|--|---|--|--|------------------|
| <b>Kecamatan</b> |  |   |  |  |                  |
| 1.               | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP  | Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP  | Inspektorat Kabupaten Bone   | Camat            |
| 2.               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik       | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | $\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$ | Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum | Camat            |


  
**BUPATI BONE.**
  

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**